

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Kinerja pemerintah yang unggul dan bisa diandalkan tentu menjadi harapan masyarakat. Sudah menjadi kewajiban bahwa pelayanan publik pemerintah harus memberikan kinerja yang optimal. Memberikan kesejahteraan pada kebutuhan masyarakat termasuk wujud atas otonomi daerah yang mana senantiasa mengedepankan dalam aktivitas melayani publik serta pertanggungjawabannya (Abdul, 2007).

Pemerintah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat yang menjadi territorial kekuasaan di daerahnya masing-masing. Aspirasi tersebut menjadi pendorong timbulnya partisipasi aktif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

Instansi pelayanan publik kinerjanya bisa dilakukan pengukuran dalam kemajuan hasil kerja yang dicapainya selaras pada target yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut berkenaan pada tingkat efektifnya penggunaan sumber daya pada saat mengeluarkan outputan yang bagus dan melakukan perbandingan terhadap hasil kerja sebelumnya.

Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja instansi adalah perspektif keuangan. Saat ini sistem penentuan anggaran yang memiliki perkembangan pesat ialah sistem penganggaran yang memiliki basis kinerja. Digunakannya sistem informasi dalam tubuh kinerja pemerintahan bisa didapatkan menggunakan penerapan *performance-based budgeting* dengan ada kaitan menggunakan anggaran organisasi sektor publik (Robinson & Last, 2009). Pemerintah memberikan aturan melaksanakan anggaran yang memiliki basis kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bisa dilaksanakan secara manual maupun memakai aplikasi komputer.

Hasil dari aktivitas mengelola sistem anggaran sejak tahap penyusunan yang memiliki hubungan menggunakan hasil yang nantinya akan dicapai. Aktivitas diterapkannya anggaran biaya yang nantinya diberikan penganggaran. Dengan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya maupun sebaliknya. Bukan hanya ada tolak ukur guna mengukur apa saja yang menjadi pencapaian kinerja pelayanan publik, tetapi juga menciptakan anggaran lebih guna menyerap anggaran dari pada penghematan anggaran. Sampai ada aktivitas menggunakan anggaran yang tidaklah diperlukann (Mardiasmo, 2009:84).

Proses penganggaran diawali dengan merencanakan, menyusun, serta aktivitas pelaksanaan harus dilaporkan serta dibuatkan pertanggungjawaban publik yang menjadikan anggaran itu betul-betul diberikan pengawasan secara ketat. Selaras pada prinsip *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan daerah harapannya betul-betul transparan menggunakan penerapan prinsip itu, guna diperolehnya kesejahteraan untuk masyarakat.

Bukan hanya itu, diterapkannya sistem akuntansi keuangan di pemerintah daerah juga memberikan suksesnya instansi itu pada saat memperlihatkan kinerja yang bagus. Sistem akuntansi keuangan daerah harapannya bisa memberi dukungan yang guna tercapaiannya kinerja pemerintah daerah yang bagus. Keuangan daerah berkenaan melakukan pencatatan dan pelaporan semua transaksi di instansi pemerintah yang ditunjukkan dalam pelayanan publik (Sukmana & Anggarsari, 2009).

Belakangan ini banyak sekali adanya penyimpangan yang berbentuk dalam penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan pengelolaan anggaran daerah, kinerja pemerintah daerah senantiasa diberikan soal-an oleh masyarakat pada saat mengelola anggaran yang dilakukannya. Terdapatnya indikasi dalam menyimpang anggaran utamanya di kota kota besar maupun di kabupaten. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.

Menurut hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 memperoleh predikat BB yaitu artinya sangat baik. Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga menargetkan untuk tahun depan penilaian SAKIP akan meraih nilai A dimuat dalam portal berita (Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2020).

Hasil yang didapatkan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo cukup memberikan kepuasan namun diperlukanya peningkatan guna mendapatkan nilai akuntabilitas keuangan yang lebih tinggi di tahun berikutnya. Pada hasil evaluasi yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah Kabupaten Ponorogo, Wakil Bupati Sudjarno mengusulkan program pemerintah yang harus dioptimalkan untuk menunjang kinerja pemerintah yang baik. Untuk mendapatkan nilai SAKIP A harus diawali dengan perencanaan yang benar-benar baik, selain itu program yang direncanakan harus menuju pada produktivitas yang tinggi terhadap kinerjanya masing-masing.

Pengertian Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Dalam ilmu akuntansi, konsep akuntabilitas harus dapat dipisahkan dari istilah *responsibilitas* karena memiliki perbedaan. Menurut Lawton and Rose, akuntabilitas artinya proses saat seseorang atau sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Adisasmita (2011:30), pengertian akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa arti akuntabilitas yakni sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan

Selain permasalahan tersebut dan adanya laporan fisik secara umum dianggap realisasi program yang ada tidak terpenuhi. Hal itu karena kurang pengawasan pada *stakeholder* sehingga instansi pemerintah yang tidak memiliki ketercapaian target. Anggaran kinerja dari pendapat Munandar (2001:3) ialah aktivitas yang penyusunannya dengan sistematis dalam melakukan pengendalian keuangan dengan periodik. Nafarin (2012:11) memberikan pendapat bahwa anggaran kinerja yaitu jumlah periodik yang menjadi rencana aktivitas perusahaan yang memberikan pernyataan menggunakan satuan mata uang maupun barang dan jasa Masukan, keluaran, dan hasil ialah indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan.

Dari pernyataan yang telah di paparkan di atas, dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja sektor publik yang optimal mendorong transparansi reformasi pada saat mengelola keuangan pemerintah. Kebutuhan pengelolaan kinerja juga dibutuhkan dalam melakukan peningkatan dalam mengukur kinerja.

Hal tersebut juga diperlukanya menjadi informasi untuk instansi pemerintah pada saat melakukan pengevaluasian dalam melaksanakan rencana yang sudah ditentukan.

Mengikuti latar belakang yang sudah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya menggunakan adanya kasus munculnya SiLPA sebagai orientasi dugaan kinerja yang belum maksimal. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan kasus nilai SAKIP yang masih BB. Dari dugaan tersebut maka peneliti tertarik dalam melaksanakan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang tercantum di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Apakah pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo?
- 2) Apakah pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bisa berkontribusi dalam bermacam-macam manfaat terdiri atas :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Dengan ini berkaitan melengkapi penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik agar semakin berkembang dan bermanfaat di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Airlangga Surabaya
Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kepastakaan ilmu akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya, khususnya akuntansi sektor publik.
2. Bagi organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi instansi khususnya pemimpin dalam perbaikan atau sumbangan pemikiran tentang partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan pada instansi.
3. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan.
4. Bagi penelitian selanjutnya
Diharapkan penelitian ini memberikan masukan mengenai kualitas anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah khususnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo serta dijadikan referensi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi yang ditulis ini menggunakan sistematika secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini menuliskan mengenai latar belakang penelitian terkait *variabel* yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Peneliti akan meneliti sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas guna mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi daerah pada penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Ponorogo

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini menerangkan yang berkaitan dengan studi literatur apa yang menjadikan dasar untuk mengetahui keterkaitan penulis untuk menganalisis antara anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Ponorogo.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu metode kuantitatif. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel memakai *purposive sampling*, yakni dengan memilih anggota sampel yang berdasarkan pada tujuan serta pertimbangan dari peneliti.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan secara rinci analisa data dan pengujian data yang didapatkan oleh peneliti. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan uji validitas dan reabilitas. Uji validitas ini untuk menunjukkan pertanyaan setiap butirnya sudah valid, serta uji reabilitas untuk menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki hasil yang reliabel. Pengujian data memakai uji t dan regresi linear berganda. Berdasarkan pengujian dan analisis data, akan diperoleh hasil yang dapat menjawab hipotesis peneliti.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 berisi tentang simpulan dari penelitian yang akan dilakukan, saran pada penelitian berikutnya dan keterbatasan penelitian.